

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan ekonomi dan lain-lain. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan adalah bidang ekonomi. Diantaranya karena ada jumlah peningkatan persentase jumlah penduduk miskin yang terus meningkat. Menurut Data Badan Pusat Statistik (2015) dalam Masta, Megayana (2016) jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%) dari 255,461,686 jiwa penduduk Indonesia, sedangkan tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%) dari 245,862,034 jiwa, hal ini menandakan bertambahnya penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Dari Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta Orang)		
	Kota	Desa	Jumlah
2014	10,36	17,37	27,73
2015	10,62	17,89	28,51
2016	10,49	17,28	27,76
2017	10,27	16,31	26,58

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indonesia juga salah satu negara yang masih melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Sementara pembangunan itu sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama, oleh karena itu dibutuhkan output yang cepat serta yang dapat dijadikan contoh dan acuan tentang arah pembangunan yang sedang berjalan saat

ini di Indonesia, sekaligus membutuhkan peran serta partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam meningkatkan pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Presiden telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang salah satunya adalah Peningkatan Kedaulatan Pangan sebagai salah satu dari Nawacita yang ada di dalam RPJMN. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial, dimana kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya.

Kebijakan Rastra salah satu bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian untuk mencapai kemandirian pangan, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan utama, dengan begitu beras menjadi salah satu komoditas nasional yang sangat penting khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bisa dikatakan keluarga miskin. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia merancang salah satu program yaitu beras sejahtera (Rastra). Rastra merupakan program dari pemerintah berupa bantuan bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu.

Program Rastra merupakan Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan

cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah serta sebagai kelanjutan kebijakan per berasan. Tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada para menterinya beserta lembaga terkait di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan di Indonesia. Presiden juga menginstruksikan secara khusus kepada perum BULOG untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran bagi para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, penyaluran beras subsidi sebanyak 15kg/ bulan untuk satu keluarga sasaran penerima manfaat KPM atau bisa disesuaikan dengan kebijakan yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1.2 Dasar Hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program Rastra

Peraturan	Tentang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012	Tentang pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002	Tentang ketahanan pangan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015	Tentang kebijakan pengadaan barang/gabah dan penyaluran beras oleh pemerintah
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016	Tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016
Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2016	Tentang petunjuk pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016
Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No 44 Tahun 2014	Tentang pembentukan tim koordinasi program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Bantul Tahun 2014

Sumber : (<https://peraturan.bpk.go.id>) diakses 06 Januari 2018 pukul 19.01

Program Rastra (Beras Sejahtera) sendiri memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat berpendapatan rendah yaitu untuk peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah sekaligus untuk penanggulangan kemiskinan, sebagai penstabil harga beras di pasar, untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, untuk memperbaiki pangan baik secara fisik maupun ekonomi (harga jual terjangkau) kepada KPM, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600/ kg atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan menjaga stock pangan nasional.

Program beras sejahtera tidak hanya membantu keluarga kurang mampu dengan beras subsidi saja tapi Presiden Joko Widodo juga meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diperuntukkan untuk KPM. Sistem yang dipakai untuk menyalurkan BPNT itu menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai banyak kegunaan, yaitu untuk e-wallet untuk menyimpan data penyaluran bantuan pangan di e-warong KUBE PKH, rumah pangan kita atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bulog dan Bank Himbara. Sedangkan beras Sejahtera akan berupa telur dan beras. Dua bahan ini dipilih berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja terbesar dari masyarakat kurang mampu yaitu membeli bahan pangan berupa beras dan telur. Pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui e-wallet yang disalurkan ke rekening penerima manfaat dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu beras dan telur. Program ini adalah terobosan baru untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia ini dan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Beras Sejahtera (RASTRA).

Ada beberapa tujuan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak lepas dari banyaknya penyimpangan. Ada beberapa hal yang terjadi dalam penyaluran program beras sejahtera ke masyarakat yang membutuhkan suka salah sasaran. Program beras sejahtera harusnya dibagikan atau dijual kepada masyarakat kurang mampu tapi kenyataan di lapangan yang mendapatkan subsidi beras sejahtera malah kelompok atau keluarga yang mampu (keluarga sejahtera). Salahnya sasaran

penerimaan ini disebabkan oleh para petugas yang nakal, dimana para petugas tidak membagikan jatah kupon beras sejahtera ke masyarakat kurang mampu melainkan membagikan kupon kepada keluarga terdekat. Bahkan banyak masyarakat yang terbilang mampu meminta jatah beras sejahtera tersebut.

Selanjutnya, jumlah beras yang di terima oleh masyarakat kurang mampu sering tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena beras sejahtera yang dijual kepada masyarakat pra sejahtera seringkali tidak ditimbang (tidak sesuai dengan program pemerintah), sehingga beras yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Kurangnya beras yang diterima oleh masyarakat pra sejahtera terjadi karena petugas lapangan berusaha tidak adil karena membagikan subsidi beras sejahtera ke masyarakat yang tidak mendapatkan kupon juga dan membagikan subsidi beras kepada masyarakat yang bisa disebut masyarakat sejahtera. Selanjutnya penyelewengan terjadi akibat jumlah kesalahan data keluarga miskin yang tidak diperbaharui, hal ini sebabkan karena masih buruknya koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, hingga Desa ataupun kelurahan. Akibatnya jumlah masyarakat miskin yang didata tidak sesuai yang berdampak pada kurangnya subsidi yang disiapkan oleh petugas.

Dalam Cholin, Fanai (2011) Di Kabupaten Bantul Jumlah Kepala Keluarga miskin pada tahun 2008 mencapai 64 ribu KK, pada tahun 2010 mencapai 47 ribu KK sedangkan menurut Larawana Intan Suri Widuri (2017) pada tahun terakhir mencapai 88.611 penerima.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2	Sanden	14.690	15.249	29.939
3	Kretek	14.375	15.249	29.939
4	Pundong	15.678	16.419	32.097
5	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6	Pandak	24.229	24.329	48.558
7	Bantul	30.455	30.889	61.344
8	Jetis	26.500	27.092	53.592
9	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11	Pleret	22.697	22.619	45.316
12	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13	Banguntapan	66.636	64.984	131.584
14	Sewon	55.784	54.571	110.355
15	Kasihan	59.712	59.559	119.271
16	Pajangan	22.741	23.211	45.952
17	Sedayu	22.741	23.211	45.952
Jumlah		475.872	479.143	955.015
Presentase		50	50.17	100

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Daerah, dengan banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Bantul membuat penerima Subsidi Rastra di Kabupaten Bantul ikut mengalami Peningkatan tahun 2016 jumlah penerima Rastra 88.611 KPM sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah penerima 97.472 KPM. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul, oleh sebab itu banyaknya jumlah penerima Rastra di Kabupaten Bantul membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang **Evaluasi Dari Program Beras Sejahtera Tahun 2016/2017.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu *“Bagaimana Evaluasi Program Beras Sejahtera di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017”* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Beras Sejahtera bagi masyarakat yang berpendapatan rendah di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat penelitian ini yaitu :

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan evaluasi program beras sejahtera di Kabupaten Bantul.

b. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat terutama kepada pembaca dan khususnya penulis dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan evaluasi program beras sejahtera di Kabupaten Bantul.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Evaluasi

Evaluasi menurut Hamilton & Ziervogel (2008:3) adalah penilaian sistematis dan objektif dari proyek yang sedang berjalan atau selesai, program atau kebijakan, desain, implementasi dan hasil. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi pengembangan, efektivitas, dampak dan keberlanjutan. Sebuah evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna yang memungkinkan penggabungan studi ke dalam proses pengambilan keputusan dari kedua penerima. Evaluasi juga mengacu pada proses penentuan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program (Hamilton & Ziervogel, 2008:3).

Evaluasi menurut King et al dalam Kumorotomo (2007) adalah proses analisis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau hasil tertentu. Evaluasi menurut Kumorotomo adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (Kumorotomo, 2007). Menurut Mardiani evaluasi adalah tempat belajar kejadian, pertanyaan yang perlu dijawab, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun, tanpa monitoring, evaluasi tidak akan ada dasar, tidak memiliki bahan baku untuk bekerja dengan, dan terbatas pada wilayah spekulasi oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring (Mardiani, 2013: 37). Evaluasi menurut Suryatna adalah tahapan yang berkaitan erat dengan

kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode. (Suryana, 2010:3).

Nilai membantu untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai standar yang baik dari administrasi publik atau baik standar kinerja. Nilai meliputi konsep efektivitas, efisiensi, daya tanggap dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan. Nilai-nilai memberikan perspektif tambahan dari yang administrasi publik dapat dievaluasi. Misalnya, prinsip tanggap terhadap kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja dari perspektif kebutuhan klien, atau prinsip orientasi pembangunan mensyaratkan sifat dasar dari Layanan Umum instrumen untuk pengembangan harus dievaluasi (Hamilton & Ziervogel, 2008:26).

Ada delapan Prinsip Batho Pele dalam Hamilton & Streets (2008), prinsip-prinsip ini memberikan lebih banyak perspektif dari mana layanan umum atau

program pelayanan pemerintah yang dapat dievaluasi. Delapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Konsultasi : warga harus dikonsultasikan tentang tingkat dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima dan, sedapat mungkin, harus diberikan pilihan tentang layanan yang ditawarkan.
- b. Standar Pelayanan: Warga harus diberitahu apa tingkat dan kualitas pelayanan publik mereka akan menerima sehingga mereka menyadari apa yang diharapkan.
- c. Akses: Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke layanan yang mereka berhak.
- d. Kesopanan : Warga harus diperlakukan dengan sopan dan pertimbangan.
- e. Informasi: Warga harus diberikan penuh, informasi yang akurat tentang masyarakat layanan yang mereka berhak menerima.
- f. Keterbukaan dan Transparansi: Warga harus menceritakan bagaimana departemen nasional dan propinsi dijalankan, berapa harganya dan siapa yang bertanggung jawab.
- g. Penanganan: Jika standar dijanjikan layanan tidak disampaikan, warga harus ditawarkan permintaan maaf, penjelasan lengkap dan cepat dan efektif memperbaiki, dan ketika keluhan dibuat, warga harus menerima simpatik, respon positif.
- h. Nilai untuk uang: Pelayanan publik harus disediakan secara ekonomis dan efisien dalam memesan untuk memberikan warga mungkin nilai terbaik untuk uang.

Di samping itu ada juga hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, acuan yang digunakan pada kegiatan monitoring merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diberlakukan, selanjutnya keberlanjutan kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas harus diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.

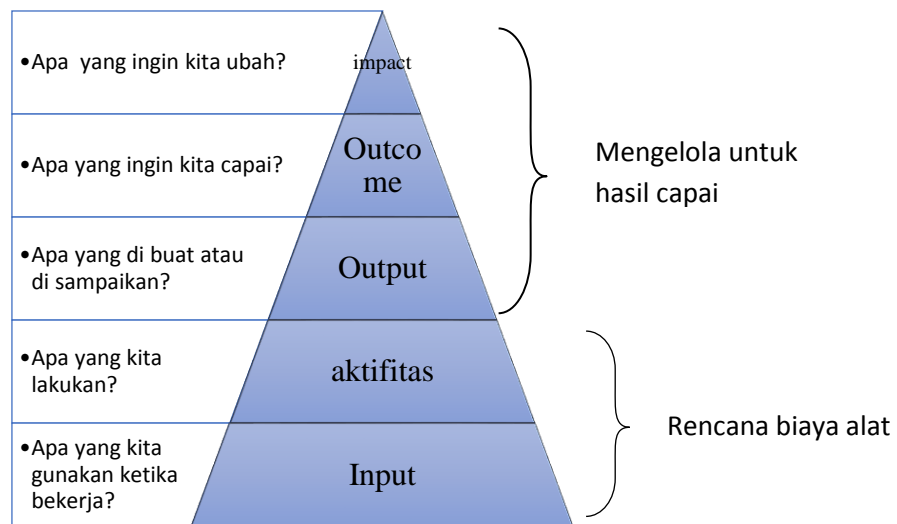
Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi menurut Nanang Fattah dalam Munajat (2015) mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi.
3. Prinsip objektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis.
6. Prinsip kegunaan atau manfaat.

Cara sederhana untuk membuat konsep program adalah dengan menggunakan model logika. Model logika merupakan unsur penting untuk mengevaluasi keberhasilan program. Model logika itu sendiri membantu untuk menjelaskan hubungan antara sarana dan tujuan. Model sederhana dari model logika terdiri atas masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak. (Hamilton & Ziervogel, 2008:42).

Model logika adalah metode analisis untuk memecah program menjadi komponen-komponen logis untuk memfasilitasi evaluasi. Sebuah model logika membantu untuk menjawab pertanyaan seperti, “Apakah tujuan dari program ini tercapai ?” dan “Apakah sarana untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dan dapat dilaksanakan ?” Jika Efisiensi didefinisikan sebagai rasio antara input dan output, maka efektivitas sebagai hubungan antara keluaran dan hasil (Hamilton & Ziervogel, 2008:42). Model logika membantu untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program. Model logika yang digunakan sangat luas sebagai kerangka kerja untuk merancang sistem monitoring atau evaluasi secara terstruktur. (Hamilton & Ziervogel, 2008:42)

Gambar 1.1 Hierarki komponen dari Logic Model



Sumber : Hamilton & Zieervogel, 2008:42.

Penjelasan komponen dari logic Model yang meliputi input, activities, output, outcomes, dan impact (Hamilton & Ziervogel, 2008:43), sebagai berikut:

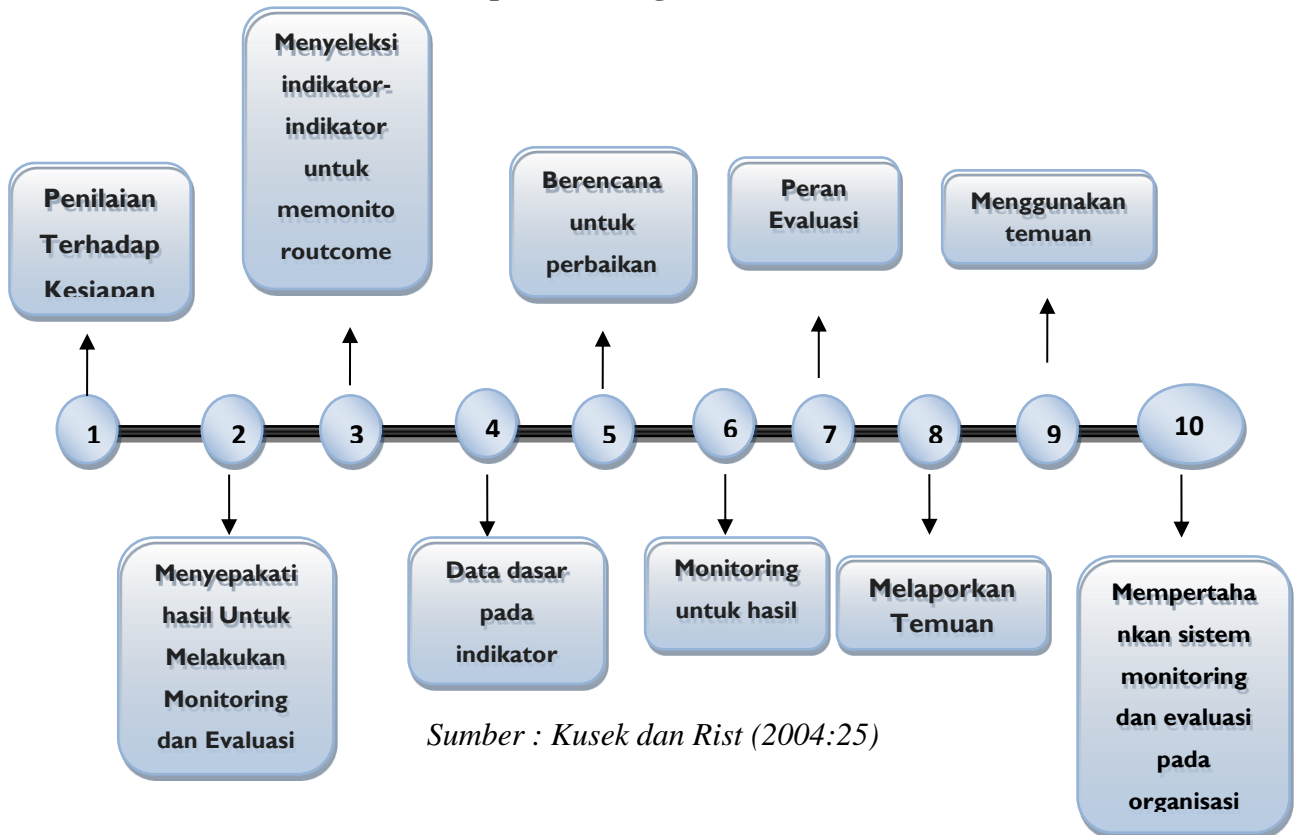
1. Input merupakan semua sumber daya yang berkontribusi terhadap produksi dan pengiriman output. Misalnya: apa yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Termasuk di dalamnya terdapat kebutuhan finansial, personil, peralatan dan bangunan.
2. Kegiatan/aktivitas merupakan proses atau tindakan yang menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output yang diinginkan dan menghasilkan sesuatu. Hal ini pada dasarnya menggambarkan sesuatu yang sedang dilakukan.
3. Output/ Keluaran merupakan hasil produk, dimana hal itu berupa barang maupun jasa yang dihasilkan atau dikirim.
4. Outcomes merupakan suatu hasil jangka menengah spesifik yang memberikan manfaat bagi penerima yang merupakan konsekuensi logis dari pencapaian output tertentu. Hasil harus berhubungan jelas dengan tujuan strategis lembaga dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana.
5. Dampak merupakan hasil pencapaian tertentu. Contohnya: mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Model Logika membantu untuk memperjelas tujuan dari setiap proyek, program atau kebijakan. Hal ini turut serta dalam membantu pengidentifikasian hubungan sebab akibat dari hasil yang diharapkan. Bisa dikatakan sebagai “logika Program”. Seperti dalam hal pengidentifikasian

indikator kinerja pada setiap tahapan (input, proses, output, hasil dan dampak) serta resiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Model logika juga sebagai mitra untuk menjelaskan tujuan dan merancang kegiatan. Selama tahap pelaksanaan, model logika berfungsi sebagai alat yang berguna untuk meninjau kemajuan dan mengambil tindakan terhadap apa yang perlu untuk dikoreksi. (Hamilton & Ziervogel, 2008:43).

Model logika dapat dijelaskan oleh logika proses produksi. Dalam proses produksi sumberdaya; seperti staf, peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk dan proses pelayanan. Terdiri dari tugas-tugas yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, menarik kesimpulan dan menulis laporan, sekaligus menerapkan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari waktu ke waktu. (Hamilton & Ziervogel, 2008:43).

Gambar 1.2 Tahap monitoring dan evaluasi berbasis hasil



Sumber : Kusek dan Rist (2004:25)

Adapun model lain dalam menentukan *monitoring* dan evaluasi yang berbasis hasil terdapat 10 langkah untuk merancang, membangun dan mempertahankan monitoring dan evaluasi sistem berbasis hasil adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penilaian terhadap Kesiapan

Penilaian kesiapan menyediakan kerangka berpikir analitik yang bertujuan untuk menentukan seberapa jauh suatu Negara me monitoring dan mengevaluasi kemajuan dalam tujuan pembangunan. Dalam tahap penilaian kesiapan merupakan fase pondasi dalam hal menilai penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dapat dirancang sedemikian baik. Adapun tiga hal utama dalam penilaian terhadap kesiapan yaitu

intensif dan kebutuhan untuk mendesain sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil, peran dan *responsibility* dari struktur yang ada untuk melakukan penilaian kerja pemerintah, kemudian kebutuhan standard kapasitas untuk sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

2. Menyepakati *Outcome* untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi

Dalam hal ini proses penyusunan dan penyepakatan *outcome* didasarkan dari indikator sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi representasi stakeholder yang spesifik.
- b. Mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (hal apa yang diperhatikan) para kelompok stakeholder.
- c. Menerjemahkan masalah menjadi *statement outcome*.
- d. Desegregasi untuk mendapatkan kunci *outcome* yang diinginkan.

3. Menyeleksi Indikator – indikator kunci untuk memonitor *outcome*

Indikator yang menjadi kunci dalam melaksanakan kinerja yang baik dapat dilihat melalui kejelasan, kerelevanan, ekonomis sebuah program, dan juga apakah sebuah program yang dijalankan memadai dan mudah di pantau hasilnya.

4. Data Dasar Indikator

Data dasar indikator dapat diperoleh dengan mengajukan delapan pertanyaan kunci, dan dari jawaban delapan pertanyaan tersebut dapat dijadikan acuan atau informasi yang memberikan dukungan keakuratan

data dalam sebuah program atau kebijakan. Berikut delapan pertanyaan kunci dalam dasar indikator.

5. Merencanakan untuk kemajuan memilih target

Target merupakan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan *outcome* dan tujuan, pentingnya setiap indikator dapat memiliki target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan sebuah program harus memiliki target sehingga tujuan sebuah program dapat terwujud dan mendapatkan hasil yang maksimal.

6. Monitoring hasil

Monitoring hasil dilakukan pada tahap *outcome* dan *goal* (dampak), *outcome* merupakan hasil jangka menengah dari *output* sebuah program yang sudah berjalan. Sedangkan *goal* merupakan dampak jangka panjang untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat.

7. Peran evaluasi

Dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan peran dari evaluasi merupakan aspek yang penting dalam penilaian sebuah program yang sudah berjalan. Adapun peran evaluasi sebagai berikut:

- a. Membantu mengalokasikan sumber daya.
- b. Membantu *rethink* dari penyebab-penyebab masalah yang muncul.
- c. Mengidentifikasi masalah yang muncul.
- d. Mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif.
- e. Mendukung reformasi sektor public dan inovasi.

f. Membangun konsesus tentang penyebab dan cara merespon suatu permasalahan.

8. Pelaporan Temuan

Menganalisis dan melaporkan temuan kinerja merupakan hal yang penting mengingat apa yang akan di laporkan, dan siapa yang dilaporkan. Langkah ini juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi indikator kendala pelaksanaan sebuah program dan bagaimana suatu organisasi memiliki kemampuan dalam proses menjalankan sebuah kebijakan maupun program.

9. Penggunaan Temuan

Tujuan utama dalam monitoring dan evaluasi berbasis hasil adalah untuk menentukan temuan yang nantinya dapat dilakukan perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program.

Berikut ini merupakan manfaat dari adanya temuan:

- a. Memahami pejabat terpilih dan tuntutan publik untuk akuntabilitas.
- b. Membantu merumuskan dan membenarkan permintaan anggaran.
- c. Membantu membuat keputusan alokasi sumber daya operasional.
- d. Pemicu mendalam pemeriksaan apa ada masalah terkait kinerja dan koreksi apa yang dibutuhkan.
- e. Membantu memotivasi personel untuk terus melakukan perbaikan program.
- f. Merumuskan dan memantau kinerja kontraktor dan penerima.
- g. Memberikan data untuk khusus, evaluasi program mendalam.

- h. Bantuan menyediakan layanan yang lebih efisien untuk upaya strategis dan lainnya.
- i. Dukungan jangka panjang perencanaan (dengan memberikan informasi dasar dan kemajuan kemudian pelacakan).
- j. Berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.

10. Mempertahankan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil

Dalam tahap ini merupakan tahap mempertahankan berbasis hasil dari sistem monitoring dan evaluasi, sistem tersebut harus dianggap sebagai usaha jangka panjang sebagai lawan episodik untuk jangka pendek atau untuk waktu lamanya proyek, program maupun kebijakan tertentu. Mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil sangat perlu dalam proses pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah maupun organisasi. Berikut 6 komponen dalam mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil:

a. Permintaan

Tujuan dari pemerintah mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil untuk mengawasi suatu program dalam pelaksanaannya, dalam hal ini permintaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk sistem tersebut terus ada yang merupakan respon dari masyarakat, pemerintah untuk dapat mewujudkan pemaksaan program yang baik berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. Peran dan Tanggungjawab

Sistem monitoring dan evaluasi berhasil dapat melihat sebuah organisasi maupun pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan sebuah program sehingga informasi terkait kinerja dapat jelas didefinisikan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelaporannya. Laporan data yang disampaikan juga harus relevan. Sehingga terlihat dari peran pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan program.

c. Terpercaya dan informasi dapat dipertanggungjawabkan

Sistem monitoring dan evaluasi harus dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dengan ini data yang dihasilkan akurat sesuai dengan pelaksanaan program yang berjalan. Harusnya ada transparansi terkait informasi dari kinerja pelaksana program.

d. Akuntabilitas

Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan program, dan perlunya *stakeholders*, masyarakat, LSM dapat memainkan perannya untuk mendorong transparansi pelaksanaan program sehingga pemerintah dapat bertanggungjawab terhadap program atau kebijakan yang dijalankan. Dalam hal ini perlunya menganalisis informasi dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil sehingga menghasilkan data terkait pelaksanaan program yang berjalan sudah tepat waktu, akurat, maupun dalam kinerjanya harus dapat dipertanggungjawabkan.

e. Kapasitas

Kapasitas merupakan keterampilan teknis dari pemerintah dalam pendataan dan analisis secara berkesinambungan dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil, sehingga membantu dalam jangka panjang pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi dapat terus berjalan dan memberikan hasil yang baik.

f. Insentif

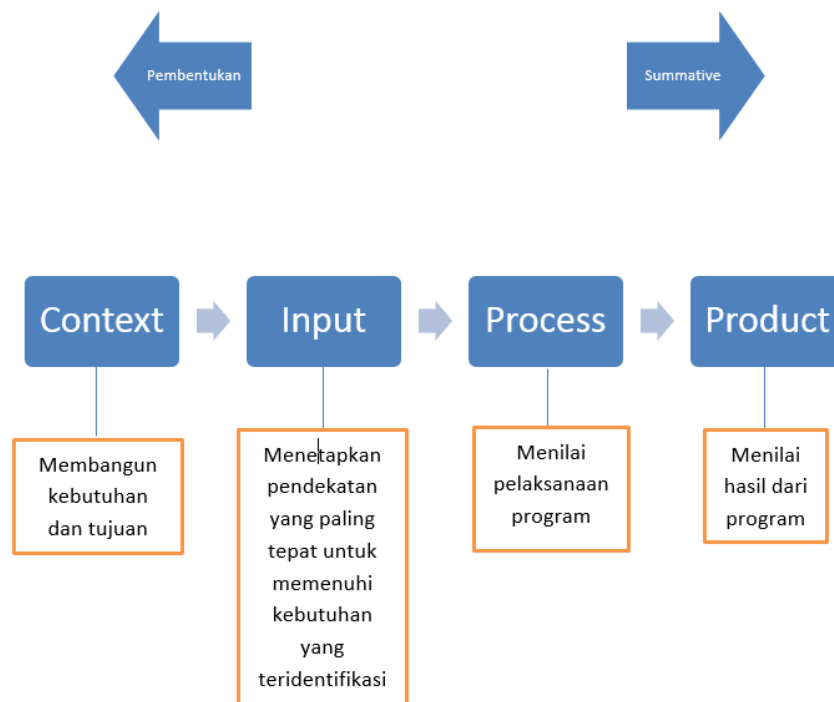
Insentif perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendorong penggunaan kinerja informasi. Dalam hal ini keberhasilan harus diakui dan diberi penghargaan, masalah yang ada juga harus diselesaikan, pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil menghasilkan informasi yang berkualitas.

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu Context, Input, Process, dan Product (CIPP). CIPP merupakan singkatan dari context evaluation artinya evaluasi terhadap context, input evaluation artinya evaluasi terhadap masukan, process evaluation artinya evaluasi terhadap process, dan product evaluation artinya evaluasi terhadap hasil. CIPP merupakan evaluasi yang dikembangkan pada tahun 1967 oleh Daniel L. Stufflebeam di Ohio State University, dengan melihat penjelasan tersebut, maka langkah evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation : evaluasi terhadap konteks, input evaluation : evaluasi terhadap masukan, process evaluation :

evaluasi terhadap proses, dan product evaluation : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.

Gambar 1.3 Komponen Evaluasi CIPP



Sumber : Daniel L Stufflebeam : 1967

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Berikut ini akan dibahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi, context, input, process, product. Berikut adalah indikator yang akan dievaluasi dalam penelitian ini:

a. Evaluasi Context

Dalam evaluasi context ini merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan dalam penemuan tujuan (Baline R. Worthern&James R Sanders : 1979). Evaluasi context ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Evaluasi context mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Stufflebeam (1983) menyatakan evaluasi context sebagai fokus intitusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan.

b. Evaluasi Input

Evaluasi input merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan SDM yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana pengguna sumber-sumber yang tersedia, alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapasitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Pertanyaan

yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

c. Evaluasi Process

Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan yang disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses, evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur yang ada pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan yang terjadi pada aktifitas dimonitor secara jujur dan cermat. Pencatatn aktifitas harian penting dilakukan karena berguna pada pengambilan keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan menentukan kekuatan dan kelemahan program. Stufflebeam juga mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan (Stufflebeam dan Shindfield, 1985:175)

Tujuan evaluasi proses yaitu untuk mengidentifikasikan atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat dalam strategi prosedur atau implementasinya (Badrujaman,2009). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar perbaikan program, serta untuk mencatat, menilai prosedurkegiatan dan peristiwa.

d. Evaluasi Product

Evaluasi produk merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur menginterpretasikan dan menilai pencapaian program (Stufflebeam dan shienfield 1985:176). Evaluasi produk merupakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi juga dapat bertujuan mengumpulkan deskripsi dan penilaian terhadap program (outcome) dan menghubungkan itu semua dengan objektif, konteks, input, dan informasi. Proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan keberhargaan program.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat di atasi secara cepat sampai sekarang. Soegijoko (1997:137) mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. BPS mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan, jadi pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan dalam menentukan kategori kemiskinan.

John Fiedman (dalam Suyanto, 1996:7) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tersebut diantaranya:

- a. Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan.
- b. Sumber keuangan, seperti income.
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik atau koperasi.
- d. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang pengetahuan dan keterampilan memadai.
- e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang disebabkan oleh berbagai hal. Menurut jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan.
- b. Sumber keuangan, seperti income.
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik atau koperasi.
- d. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang pengetahuan dan keterampilan memadai.
- e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang disebabkan oleh berbagai hal. Menurut jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kemiskinan relatif : kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lainnya seperti seseorang yang tergolong mampu pada suatu daerah bisa jadi yang termiskin di daerah lainnya.
- b. Kemiskinan absolut : kemiskinan yang diderita seseorang atau keluarga dikarenakan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan (Sudarwati, 2009: 25)

Berdasarkan teori di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan mempunyai dua jenis yaitu kemiskinan relative dan absolut, kemiskinan relatif dilihat melalui perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya, sedangkan kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang diderita seseorang dikarenakan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi secara terus menerus, di negara maju kemiskinan disebabkan karena seseorang mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah, dan sebagainya atau dengan kata lain, kemiskinan di negara maju lebih bersifat individual. Sedangkan di negara berkembang, kemiskinan disebabkan pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan.

Ada beberapa penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000 : 107) yaitu:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas dan upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertinggalan akses manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah.

3. Program Beras Sejahtera

Rastra merupakan program yang di intruksikan oleh Presiden tentang kebijakan per berasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada para kepala Menteri dan kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian Tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi. Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang mempunyai tugas untuk

mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi. Menurut Winarni (2012) Raskin yaitu untuk memberikan perlindungan kepada rakyat miskin melalui beras yang disubsidikan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga yang kurang mampu.

Beras sejahtera sering kita kenal dengan beras miskin (Raskin) namun tetap mempunyai arti yang sama yang merupakan sebuah program yang di Intruksikan oleh Presiden untuk memberikan bantuan pangan bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia yang berupa penjualan beras murah dibawah harga pasar yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diberikan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah merupakan program dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan untuk memberikan perlindungan sosial pada masyarakat rendah. Menurut Pedoman Umum (PEDUM) beras sejahtera (2017) terdapat beberapa indikator keberhasilan program raskin agar bisa tersalurkan untuk masyarakat kurang mampu yaitu dilihat dari tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan secara singkat, jelas dan tegas dari beberapa konsep yang diambil dari kerangka teori dalam sebuah penelitian. Definisi konseptual juga merupakan batasan penjelasan terhadap beberapa konsep agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan.

1. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk melihat realisasi kegiatan agar mengetahui masalah atau kekurangan suatu program.
2. Kemiskinan adalah sebuah tingkatan hidup yang dikatakan rendah atau suatu masalah yang terkait dengan sosial yang senantiasa hadir dan muncul di tengah masyarakat, dan kemiskinan juga merupakan keadaan dimana seseorang kurang sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar kehidupan kelompok.
3. Beras Sejahtera (Rastra) adalah suatu program dalam bentuk subsidi pangan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian beras kepada masyarakat kurang mampu agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan Pada suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator keberhasilan dari program Rastra dapat dilihat apabila:

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Conteks	1. Tujuan Program Rastra
		2. Sasaran Program Rastra
2	Input	1. Sumber Daya Manusia
		2. Penjadwalan Program Rastra
		3. Anggaran Program Rastra
3	Proses	1. Alur pendistribusian Program Rastra
		2. Perubahan dari adanya Program Rastra
		3. Feedback
4	Produk	1. Tepat Sasaran
		2. Tepat Jumlah
		3. Tepat Harga
		4. Tepat Administrasi
		5. Tepat Waktu
		6. Tepat Kualitas

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (Febriani, 2013) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode kualitatif berdasarkan pemahaman dan penafsiran makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi, menurut Imam Gunawan (2015). Jadi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif akan mendukung penelitian yang dilaksanakan untuk meneliti evaluasi program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) di Kabupaten Bantul.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

3. Unit analisis Data

Pelaksanaan penelitian ditunjang dengan data dari sumber-sumber tertentu yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisis datanya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang dianggap relevan dalam artian tepat dijadikan sumber utama data yang diperoleh dari pegawai yang berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari hasil dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, serta gambar-gambar yang ada untuk memperkuat data tambahan. Dalam hal ini peneliti melihat dari dokumen-dokumen, data-data, catatan-catatan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, serta website dan studi pustaka.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana program Beras sejahtera RASTRA di Kabupaten Bantul.

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu proses implementasi program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kabupaten Bantul. Observasi dilakukan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung, pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian. Observasi secara langsung dilakukan untuk dapat menjelaskan prosedur program Beras sejahtera (RASTRA).

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi yang ingin diketahui lebih mendalam terkait gejala sosial yang terjadi melalui pengajuan beberapa pertanyaan yang diperlukan dan disertai jawaban secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari hasil mewawancarai penerima bantuan sosial dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

5. Teknik Analisi Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan berdasar pada jenis data yang didapatkan selama penelitian di lapangan. Untuk jenis data yang didapatkan berdasar pada wawancara dan dokumentasi yang akan dikembangkan. Proses analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Miles dan Huberman

(Lexy Moleong, 1995) yaitu analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang datang dari data-data di tertulis lapangan. Selain itu, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengarahkan, mengelompokkan, menajamkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan. Cara yang dipakai reduksi data dapat melalui seleksi yang sangat panjang, melalui beberapa cara yaitu meringkas atau mengsingkat dan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan analisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan yang ada senantiasa diuji kebenarannya, kelompoknya dan kecocokan nya yang merupakan validitas nya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. Pada tahap ini penelitian penelitian menarik kesimpulan yang ada dari data yang telah di

kumpulkan dan disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian.